



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

NOMOR: SK.58/SETJEN/ROUM/KLN.0/7/2022

TENTANG

**PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TENAGA AHLI TAMBAHAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL
INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* perlu dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan tenaga ahli penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan, Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Conventions on Climate Change* (Peretujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

\8.Peraturan...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada Tanggal : 21 Juli 2022
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.58/SETJEN/ROUM/KLN.0/7/2022

Tanggal : 21 Juli 2022

PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TENAGA AHLI TAMABAHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL
INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama	Instansi
1.	Yohanes Budi Sulistiodadi, S.Hut, M.Sc, M.S, Phd,	Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman
2.	Rustam, S.Hut, M.P	Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman

SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001